

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh calon Kabupaten Wasile sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 yang mana, karena ditingkat daerah baik kabupaten dan propinsi telah selesai. Dan saat ini aspirasi tersebut sudah masuk ke direktorat dirjen otonomi daerah. Dan apa yang disampaikan oleh Direktorat Dirjen Otonomi Daerah dalam wawancaranya. Bahwa Wasile Untuk menjadi sebuah daerah yang berdikari dan mandiri, Wasile layak untuk dimekarkan. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.
2. Mengapa usulan pemekaran Wasile belum di disetujui oleh pemerintah pusat. Dikarenakan, ada beberapa daerah calon otonominya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Akan tetapi para elit-elit politik perwakilan dari beberapa wilayah di indonesia tersebut, terlalu memaksakan untuk dimekarkan dan melakukan aksi didepan kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah. Sehingga, dari 65 CDOB amanat presiden (AMPRES) Tahun 2013, seluruh indonesia baik itu calon daerah baru untuk propinsi, kab/kota, semuanya diberhentikan sementara termasuk Wasile juga di dalamnya. Jadi intinya, wilayah Wasile tinggal menunggu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

---

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran daerah baru kabupaten wasile.

a) Persoalan faktor pendukungnya, Wasile sangat mendukung untuk menjadi sebuah daerah otonom: antara lain: (i). Wasile adalah penghasil lumbung padi terbesar di Propinsi Maluku Utara. Karena, Wasile merupakan transmigrasi terbesar juga di Propinsi Maluku Utara, (ii). Wasile adalah salah-satu wilayah di Indonesia yang berlimpah ruah akan kekayaan alamnya. Seperti, nikel, batu gamping, minyak dan lain-lain. (iii). Wasile merupakan salah-satu wilayah yang strategis yang mana pusat perhubungan di Kab. Halmahera Timur melalui jalur darat untuk menuju Propinsi lebih dekat, dan jalur laut lebih mudah jangkauannya untuk menuju beberapa Kab. Di Propinsi Maluku Utara, seperti tobelo, ternate, tidore, morotai dan lain-lain. Bahkan keluar dari Propinsi Maluku Utara seperti Manado, Bitung dan Jawa. Dan (iv). Wasile memiliki sumber daya manusia yang lumayan bagus. (v). Wasile mempunyai pendapatan perkapita diatas standar baik itu dari sektor pertanian, perkebunan yang menjadi leading sektanya. Dan sektor pertambangan.

b) Faktor penghambat bagi Wasile sendiri, untuk berdikari dan mandiri penulis merasa secara teknis tidak ada yang bermasalah lagi, seperti yang penulis ketahui bahwa satu pandangan antara forum-forum masyarakat Wasile bersama DPRD Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur, DPRD Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, DPR RI

---

Komisi Dua, dan Dirjen Otonomi Daerah. Jadi Wasile tinggal menunggu waktu untuk diparipurnakan oleh pemerintah pusat.

## **B. Saran**

Kabupaten induk Halmahera Timur merupakan salah-satu kabupaten yang cukup luas, sehingga mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya sesuai dengan harapan masyarakat sangat memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, salah-satu solusi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, adalah dengan menghadirkan pemekaran diwilayah Wasile. Guna memperpendek rentang kendali sehingga lebih mudah mengakses pelayanan publik kepada masyarakat dan terbuka lebar lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Namun dalam hal ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan benar oleh pemerintah setempat. Karena hakikat dari pada otonomi daerah adalah kesejahteraan sosial bukan untuk semata-mata para elit politik lokal saja yang ada di daerah pemekaran tersebut. Maka dari itu, harus lebih fokus untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat wilayah pemekaran. Antara lain: membangun infrastruktur, sekala prioritas pembangunan di bidang SDM untuk mencerdaskan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan demikian akan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia.